

Analisis Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Upk Dharma Agung Kecamatan Kunir

Erma Widayanti¹, Ratna Wijayanti DP², Agus Salim³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang

ermawidayanti89@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur simpan pinjam yang diterapkan pada UPK Dharma Agung Kecamatan Kunir. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian sistem dan prosedur simpan pinjam. UPK merupakan wadah masyarakat bekerjasama secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan, kebutuhan, kesamaan aktifitas dan dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. UPK merupakan salah satu lembaga lokal yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat, karena dapat terlihat adanya proses pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif. Pada tahun 2017 unit usaha yang terdapat pada UPK hanya 1, yaitu toko. Masalah-masalah yang dihadapi UPK ini lebih banyak terhadap masalah intern yaitu kredit macet/tunggakan, kelembagaan, tidak ada jaminan sehingga perlu sosialisasi. Permasalahan ini dapat diatasi melalui perbaikan terhadap fungsi badan pengurus dengan cara pembinaan dan pelatihan atau dengan dibentuknya kepengurusan baru dengan merekrut karyawan baru. Keberhasilan dari UPK adalah UPK sudah bisa berbadan hukum dan memiliki gedung sendiri, dan kegagalannya adalah unit-unit usaha UPK terasa minim. Identifikasi pinjaman bermasalah berawal dari data pinjaman yang ada di UPK, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas. Hasil identifikasi sebagai instrument validasi kondisi sebenarnya pada kelompok yang dilakukan oleh UPK dan Tim verifikasi.

Kata Kunci : Sistem, Prosedur, Simpan Pinjam.

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze system and procedure of saving and loan applied at UPK Dharma Agung District Kunir. This research is qualitative descriptive analysis that is research system and procedure of saving and loan. UPK is a community forum to cooperate voluntarily based on common goals, needs, similarities of activities and formed by the community for the benefit of the community itself. UPK is one of the local institutions that can be used as a forum for community empowerment, because it can be seen the process of empowerment is done collectively. In the year 2017 business units contained in the UPK only 1, ie stores. The problems faced by the UPK are more on the internal problems of bad credit / arrears, institutions, no guarantees so need socialization. This problem can be solved through the improvement of the functioning of the governing body by way of coaching and training or with the establishment of new management by recruiting new employees. The success of the UPK is that the UPK has legal status and has its own building, and its failure is that the units of UPK are minimal. The identification of problem loans starts from the existing loan data in UPK, loan progress reports and collectibility reports. Result of identification as instrument validation of actual condition in group conducted by UPK and Team verification.

Keywords: System, Procedures, Savings and Loans.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya organisasi dan usaha UPK terdapat disemua wilayah di negara Indonesia, sistem-sistem ekonomi yang diterapkan satu sama lainnya berbeda-beda. Bagi UPK yang berada di daerah pedesaan khususnya wilayah yang sedang berkembang, dan industrinya belum maju, bisa menyamakan sendirinya dan lingkungan yang selalu berkembang dan hal ini bukan merupakan pekerjaan mudah, mengingat daerah yang sedang berkembang, pada umumnya dalam bidang ekonominya tertinggal beberapa tahun bandingkan dengan wilayah industri. Situasi dan kondisi yang demikian ini dengan sendirinya akan menekan kehidupan dan perkembangan gerakan UPK, terutama bagi gerakan UPK di wilayah yang sedang berkembang dan ini merupakan target sekaligus bahaya untuk dunia UPK. Dalam hal ini seperti perkembangan dalam bidang UPK di berbagai wilayah akhir-akhir yang bukan terlepas untuk peranan UPK sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Kemiskinan memperlambat berkembangnya sebuah bangsa, hal bisa menjadi di Negara kita untuk keadaan yang sangat krisis bagi masyarakat Indonesia dan semakin sulit dalam membangkit. Peristiwa ini banyak terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun potensi dirinya dan wilayah pedesaannya meskipun mendukung dan sumber daya dan bercukup melimpah. Penanggulangan kemiskinan ialah jadi agenda pada prioritas utama pembangunan Nasional yang dulu sampai saat ini. Dalam berbagai strategi, kebijakan dan memprogram untuk kegiatan penanggulangan masyarakat miskin sudah merancang untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang pembangunan, maka tugas pemerintah antara lain adalah melayani, mengayomi, dan tumbuh ialah berkembang, prakarsa masyarakat.

Indonesia mempunyai permasalahan masyarakat miskin untuk pengangguran. Masyarakat miskin di Indonesia bisa melihat untuk 3 pendekatan yaitu miskin alami, miskin struktural yang berkesenjangan sekitar daerah. Masalah kengangguran bisa memicu dan merendahnya kesempatannya yang berpeluang bekerja untuk angkatan bekerja di desa upaya untuk menanggulangnya harus digunakan mendekatkan ekstra sopan dan dimensi sumber daya. Pemberdayaan dan telah bisa memadukan aspek aspek untuk menyadarkan, meningkatkan kualitas, yang mendayagunakan. Kemiskinan adalah permasalahan yang membangun dan menandai untuk kengangguran ialah keterbelakangan, selanjutnya ditingkat jadi tertimpangan. Masyarakat kemiskinan untuk khususnya melemah untuk kemampuan berusaha dan keterbatasan aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga ketinggalan menjauh kepada masyarakat lain yang memiliki potensial lebih tinggi. (Kartasmita, 1997: 234). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ialah program yang mempercepat menaggulangi miskin secara terpadu yang berkelanjutan. Yaitu kegiatan dan menyelenggarakan PNPM Mandiri ialah kegiatan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan). Seperti simpan pinjam yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dharma Agung di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) yang dapat digunakan alat membantu konvensional adalah masih menggunakan buku besar, sehingga timbul seberapa persoalan ialah lamanya diproses mencatat pendataan, yang bisa menjadi salah mencatat dan bisa menghasilkan yang bukan sama dan ialah harusnya, terkadang bisa ada sedikit angka sehingga membuat pelaporan dibutuhkan waktu dan bisa cukup lama yang tidak terselesaikan tepat waktu. Selain itu juga tidak sedikit data yang hilang dikarenakan banyaknya data dan sulit dalam memantau perkembangan angsuran. Sehingga penulis merancang dan membangun Sistem Mengolah Data Simpan Pinjam yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan pada sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang dan bisa menguraikan diatas, peneliti hendak untuk mengerjakan penelitian sehubungan formalitas simpan pinjam khusus wanita pada UPK Dharma Agung oleh karena tersebut penulis tertarik guna mengusung masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam Khusus Perempuan pada UPK Dharma Agung”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang harus menggunakan untuk penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian ini meneliti sistem dan prosedur simpan pinjam khusus perempuan pada UPK Dharma Agung Kecamatan Kunir. Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian ini adalah sistem dan prosedur simpan pinjam khusus perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada UPK Dharma Agung kecamatan kunir ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa UPK Dharma Agung memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Sumber data untuk penelitian ini ialah obyek dimana data diperoleh oleh peneliti. Data membagi jadi dua macam yaitu data eksternal dan internal.

Untuk mendapatkan data-data dan membutuhkan untuk kerangka penyusunan tugas akhir, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dimana teknik-teknik tersebut saling melengkapi sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Data Dokumentasi yaitu tehnik mengumpulkan data untuk melihat dan mempelajari yang ada pada lokasi penelitian, dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.
- b. Kepustakaan adalah untuk didatangi keperpustakaan kemudian dicari buku-buku, literature, artikel dan sama dalam permasalahan dan mengangkat, yang menginformasikan dan mendapat menggunakan dalam pemecahkan permasalahan dan berkaitan dalam sistem dan prosedur simpan pinjam khusus perempuan.
- c. Observasi yaitu tehnik mengumpulkan data untuk dilakukan dan mengamati langsung pada objek atau sistem yang akan diteliti sehingga memperoleh data dalam efisien dan efektif dalam membandingkan untuk data yang didapatkan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPK Dharma Agung Kecamatan Kunir yang berlokasi di jalan Diponegoro 01 Kunir Lor Kabupaten Lumajang, Kode Pos 67383. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan PNPM Mandiri untuk mengupayakan dipercepatnya pengupayaan pengentasaniskinan dalam memperluas kesempatan bekerja di desa. Program ini melakukan dan selebihnya untuk didorong untuk mengupayakan dan meningkatkan kualitas dan kehidupan, sejahtera kemudian mandiri untuk masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri adalah menyelaraskan nama kepada mekanisme dalam prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan dapat melaksanakan dari sejak tahun 1998. Program berdayaan kemasyarakatan yang membesar di bangsa ini dipusatkan kegiatan untuk kemasyarakatan Bangsa Indonesia yang termiskin di desa dalam menyediakan fasilitasi pemberdayaan kemasyarakatan/lembaga sekitar, mendampingi dan melatih, kemudian pendanaan untuk bantuan langsung kepada Masyarakat (BLM) untuk masyarakat, senilai Rp. 1 miliar sampai Rp. 3 miliar per-kecamatan. PPK atau PNPM-PPK, untuk PNPM Mandiri Pedesaa semua keanggotaan masyarakat mengajak melibatkan untuk tahap program seperti partisipasi, dimulai yang dari proses merencanakan, mengambil putusan untuk menggunakan dalam mengelola modal yang sama membutuhkan dengan prioritasif di pedesaan, harus kepada melaksanakan program yang pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan selama dalam aturan pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen untuk Negeri, dalam membiayai kepada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di daerah Sumenep dimulai sejak tahun 1998/1999 (PPK Sikuls 1) di 5 kecamatan dengan alokasi dana Rp. 3 Milyar. Sampai dengan tahun 2011 lokasi PNPM di daerah Sumenep telah menjadi 25 kecamatan dengan alokasi dana Rp. 184,720 Milyar dana APBN dan Rp. 41,930 Milyar dari DDUB APBD. Dari PNPM kemasyarakatan melibatkan melalui aktifis untuk disetiap tahap program pembangunan di desanya. Setiap pentahapan merencanakan, mengambil putusan, melaksanakan dalam mengupayakan peliharaannya.

Berdasarkan hasil survey dari sistem dan prosedur simpan pinjam dalam dilakukan, berikut ini adalah gambaran prosedur dari proses-proses untuk saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran Anggota

Setiap anggota yang bergabung menjadi anggota kelompok UPK terlebih dahulu mengajukan dan mengisi proposal yang diajukan ke UPK. Anggotanya adalah masyarakat umum. Setelah membuat proposal kemudian diserahkan ke kantor UPK untuk di verifikasi, selanjutnya akan rapat MKP (musyawarah khusus perguliran).setelah itu akan penyaluran dana atau pencairan.

Masalah – masalah yang dihadapi UPK Dharma Agung

1. Kredit macet/tunggakan
2. Kelembagaan
3. Menganggap remeh, tidak ada jaminan
4. Sehingga perlu sosialisas

Evaluasi UPK Dharma Agung

1. Evaluasi bulanan

Evaluasi bulanan adalah menyelesaikan masalah yang sifatnya ringan.

Misalnya tunggakan, rapat kelembagaan untuk menyelesaikan konflik internal dan kelembagaan.

2. Evaluasi tahunan

Evaluasi tahunan adalah evaluasi yang dilakukan setiap tahun, contohnya MAD (musyawarah antar desa)yaitu untuk memutuskan rencana dalam keuangan satu tahun pergantian pengurus jika ada masalah.

Masalah Kepengurusan Yang Tidak Profesional

Yang terjadi biasanya untuk mengerti tugasnya pokoknya dan fungsinya

Kualitas sumber daya

Terbatas kurangnya tenaga secara kuantitas dan secara kualitas.

Kurangnya Perhatian Pemerintah

Dalam bentuk paska program pemerintah menganggap UPK sudah mandiri, sehingga secara pendampingan yang intensif terasa kurang akibatnya banyak UPK yang bingung dalam rangka memilih subyek buku dan badan hukum bagi UPK.

Keberhasilan dan kegagalan

Keberhasilannya adalah UPK sudah bisa berbadan hukum, UPK sudah memiliki gedung sendiri.Kegagalannya adalah pengembangan unit-unit usaha UPK terasa minim.

Prosedurnya yang sedang berjalan

Untuk mengurangi terjadinya pinjaman bermasalah perlu dilakukan pola penagihan kelompok sedini mungkin

Dalam lembaga keuangan dan bank. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan : jaminan.

Penilaian tingkat kolektibilitas PNPM MANDIRI PERDESAAN permodalan sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada “negative list” sector usaha

Untuk menjembatani kebutuhan tentang definisi pinjaman bermasalah yang sesuai dengan penjelasan PTO adalah:

1. Telat mengangsur atas 3 bulan dari yang telah ditentukan yang diangsur tiap bulan.
2. Tunggakan angsuran diatas 4 dari yang telah ditentukan per triwulan
3. Tunggakan angsuran diatas 7 dari yang telah ditentukan per 6 bulan.

Ketiga hal tersebut dalam diperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi usaha baik kelompok atau pun individu pemanfaat.

Kategori permasalahan kelompok

1. Permasalahan micro-finance yaitu masalah menyebabkan dari karakter/itikad dan kemampuan usaha dengan kondisi sebagai berikut
 - a. Kondisi usaha Kelompok Usaha Bersama tidak mampu mengembalikan
 - b. Pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha mempunyai itikad untuk tidak mengembalikan
 - c. Kesalahan pada penentuan jadwal pembalian tidak sama
2. Permasalahan penyelewengan yaitu masalah mengakibatkan adanya selewengan pendanaan.

KESIMPULAN

UPK Dharma Agung Kecamatan Kunir merupakan unit pengelola kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkannya sejahtera yang berkesempatan berkerja kemasyarakatan kemiskinan di desa yang didorong oleh mandiri untuk mengambil kesimpulan dengan mengelola dan membangun. UPK adalah. Anggota kelompok merupakan bagian paling benar untuk dalam organisasime UPK, hal ini dikarenakan anggota kelompok merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa UPK. Berdasar hasilnya penelitian dengan hasil survey dari UPK Dharma Agung masih terdapat kekurangannya diantaranya dalam pendapatan pinjaman yang secara manual yang dapat berakibat hilangnya dokumen dan ada kegagalan pengembangan unit-unit usaha UPK terasa minim. Disisi lain UPK Dharma Agung cukup baik mengelola untuk menangani 1 unit usaha diantaranya toko usaha. Dalam pelaksanaan unit toko sangat memenuhi target dan membantu anggota kelompok dalam pinjaman sembako. Tetapi jika semua kegiatan UPK bisa lebih menjalankan yang sebaik baiknya dengan kelompoknya yang mau mengambil bagian didalam kegiatan UPK, serta memberikan motivasi yang baik, UPK dan bisa berjalan dengan lancar dan baik .

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana. 2010. *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ardana, I Cenik dan Lukman, Hendro. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Aini, Nurul. Analisis Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam Pada KUD Tempeh tengah. Proposal Widya Gama Lumajang. 2016.
- Atikah, Hayyu Ratna.dkk. Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Wanita Putri Harapan Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan.*Jurnal Teknik Informatika*. 2013.
- Atikah, Hayyu Ratna dan Sukadi. 2014. Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwija Karya Kecamatan Tulakan. *Journal Speed*.

Vol 6 No 1. 2014.

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta : UGM.

Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Empat. Yogyakarta.

Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

_____.2016. *Sistem Akuntansi*.Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat

.2001. *Sistem Akuntansi* Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.

Nafarin M. 2009. *Penganggaran Perusahaan* .Penerbit Salemba 4. Jakarta

Nurhanafi, Anis. Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo.*Indonesia Journal On Networking And Security*. Vol. 3 No. 3. 2014.

Romney, Marshall B dan Steinbart, Paul John. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Sandi, Putra Ari.dkk. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 21 No. 2. 2015.

Susanti, Nanik. Sistem Informasi Simpan Pinjam Badan Keswadayaan Masyarakat Studi Kasus BKM Sarjana Makmur. *journal Simetris*.2014.

Syahputri, Bayu Trei. Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2013. Skripsi. 2016.

Suharli, Michell. 2006. *Akuntansi Untuk Bisnis Jasa Dan Dagang*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Widjaja, Amin Tunggal. 2003. *Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard*. Harvarindo : Jakarta.